Terakreditasi SINTA 4 No: 148/M/KPT/2020

J SIG (JURNAL SAINS INFORMASI GEOGRAFI)

https://journal.umgo.ac.id/index.php/GEOUMGo/index

Volume 6 Nomor 2, November 2023 ***ISSN 2614-1671***

ZONASI SPASIAL SMA NEGERI DALAM PENERIMAAN SISWA BARU DI ZONA D, KABUPATEN KUNINGAN

Spatial Zoning of State High School in the Admission of New Students in Zone D of Kuningan Regency

Mohamad Tusam[1], Jalu Rafli Ismail[2], Dede Sugandi[3]

[1,2,3]Program Studi Pendidikan Geografi, Universitas Pendidikan Indonesia, Indonesia
Email Korespondensi: mohamadtusam27@upi.edu

Received: 07/08/2023 | Revised: 24/10/2023 | Accepted: 26/10/2023

DOI: https://dx.doi.org/10.31314/jsig.v6i2.2453

Abstract *- The establishment of zoning for Public High Schools in Zone D of Kuningan Regency is determined by the government, with a total of 4 schools designated for this purpose. Meanwhile, data from Dapodik indicates the presence of 22 junior high schools scattered within this zone. This number does not include the count of MTs (Madrasah Tsanawiyah) under the Ministry of Religious Affairs. This situation highlights the limited capacity of Public High Schools. On the other hand, there is no clear basis for dividing the geographical areas among the schools to accommodate new students within the zone. Consequently, there is a potential for imbalance among Public High Schools in accepting new students. The research aims to determine the distribution and service areas, as well as the zoning of Public High Schools in Zone D of Kuningan Regency. Geographic Information System (GIS) methods include overlay analysis used for the distribution analysis and zoning of new student admissions. Thiessen polygon analysis is employed for service area analysis, and remote sensing techniques with a supervised classification approach are used to analyze land distribution. The results show that the distribution of Public High Schools in Zone D extends towards the west, towards the city center of Kuningan Regency, and is limited in the eastern direction, towards the border of Central Java Province. SMA Negeri 1 Cibingbin has the largest service area, covering 12,534 ha, including 6,998 ha in the Cibingbin subdistrict, 1,907 ha in Cimahi, 485 ha in Karangkancana, 3,143 hectares in Cibeureum, and a residential area of 351 ha.*

Keywords*: New Student Admissions; State High School; School Zoning; Zone D*

Abstrak – Penetapan zonasi Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) di zona D Kabupaten Kuningan, ditetapkan oleh pemerintah sebanyak 4 Sekolah. Sementara itu data Data Pokok Pendidikan (Dapodik) menunjunkan sejumlah 22 Sekolah Menengah Pertama tersebar di zona tersebut. Jumlah ini belum termasuk jumlah Madrasah Tsanawiyah (MTs) dibawah naungan Kementerian Agama. Hal ini menunjukan keterbatasan daya tampung SMAN. Di sisi lain, antar sekolah tidak memiliki landasan pembagian wilayah untuk mengakomodir siswa baru di dalam zona tersebut. Sehingga berpotensi mengakibatkan ketimpangan antar SMA Negeri dalam menerima siswa baru. Penelitian bertujuan untuk mengetahui sebaran dan area layanan, serta zonasi SMA Negeri di Zona D Kabupaten Kuningan. Metode Sistem Informasi Geografis mencakup analisis overlay digunakan untuk analisis sebaran dan zonasi penerimaan siswa baru. Analisis thiessen polygon untuk analisis area layanan. Teknik penginderaan jauh dengan pendekataan supervised classification juga digunakan untuk analisis sebaran lahan pemukiman. Hasil menunjunkan sebaran SMA Negeri di zona D tersebar ke arah barat menuju ke arah pusat kota Kabupaten Kuningan dan terbatas ke arah timur menuju ke perbatasan Provinsi Jawa Tengah. SMA Negeri 1 Cibingbin memiliki area layanan terluas yakni 12.534 ha meliputi kecamatan Cibingbin seluas 6.998 ha, Cimahi seluas 1.907 ha, Karangkancana seluas 485 ha, Cibeureum seluas 3.143 ha dan dengan luas pemukiman 351 ha.

Kata kunci: Penerimaan Siswa Baru; SMA Negeri; Zonasi Sekolah; Zona D

Under the license CC BY-NC-SA 4.0

PENDAHULUAN

Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 sebagai dasar negara menjamin hak pendidikan seluruh warga negara. Hal ini tidak lain untuk mewujudkan cita-cita nasional yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Pemerintah wajib memberikan layanan pendidikan bagi masyarakat, dan menjamin tersedianya dana untuk pendidikan (UU 20, 2003). Kenyataan dilapangan bahwa desa yang jauh dari kota masih sering ditemukan kesenjangan akses layanan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah. Anak-anak di pedesaan tidak memiliki kesempatan pendidikan yang sama dengan anak-anak perkotaan. Sementara, sumber daya pendidikan yang ada di pedesaan, baik guru, gedung sekolah, alat peraga, jauh lebih sedikit dibandingkan di perkotaan (Hong et al, 2015). Di kota dan daerah sekitarnya akses pendidikan nampak lebih merata daripada di desa. Seperti distribusi sekolah di kota relatif berdekatan, mudah diakses dan didukung fasilitas moda transportasi serta jalan yang layak. Kondisi tersebut berbeda ketika di desa yang lokasinya jauh dari kota. Akses pendidikan relatif lebih sulit dijangkau di mana jumlah sekolah terbatas dan distribusi yang relatif berjauhan diikuti dengan fasilitas moda transportasi dan jalan yang tidak mendukung untuk sampai ke sekolah. Kecukupan unit sekolah dan aksesbilitas sekolah merupakan kriteria pendidikan yang baik (Soydan, 2022).

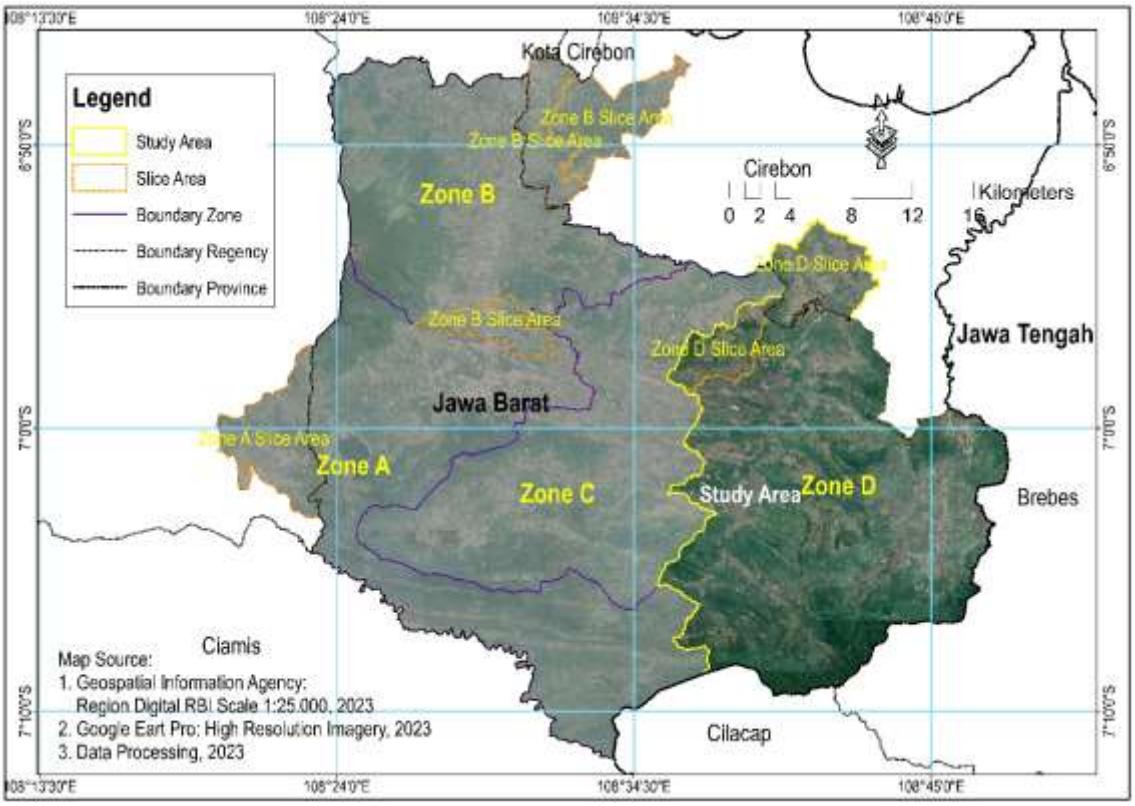
Ditinjau dari pendapatan masyarakat di desa yang relatif homogen dengan mengandalkan sumber pendapatan dari pertanian yang relatif masih tradisional, masyarakat kota memiliki berbagai peluang yang dapat dijadikan sebagai sumber pendapatan. Faktor kesadaran masyarakat di desa relatif kurang akan pendidikan. Hal ini menjadi pertimbangan tersendiri bagi masyarakat di wilayah tersebu jika dihadapkan dengan biaya pendidikan yang mahal. Bagi masyarakat dapat mengenyam pendidikan di sekolah negeri merupakan keniscayaan dengan harapan biaya pendidikan lebih realistis dibandingkan dengan di sekolah swasta. Kesenjangan antarkelompok ekonomi masih menjadi masalah yang terus meluas seiring dengan semakin tinggi jenjang pendidikan (Perpres 18, 2020). Masalah pemerataan pendidikan adalah masalah keadilan bagi masyarakat untuk berkesempatan yang sama dalam bidang pendidikan.

Berbagai upaya telah banyak dilakukan pemerintah untuk mengatasi permasalahan pendidikan terutama masalah dalam pemerataan akses layanan pendidikan yang berkeadilan. Salah satu upaya pemerintah saat ini ialah melalui kebijakan zonasi sekolah. Zonasi sekolah merupakan kebijakan yang menentukan siswa mana yang dapat bersekolah di sekolah mana (Stewart et al, 2021). Zonasi sekolah dimaksudkan untuk memberikan akses layanan pendidikan yang berkeadilan kepada siswa tanpa membedakan status, sosial, dan kemampuan ekonomi (Safitri & Yusran, 2021). Zonasi sekolah menekan biaya pendidikan dan biaya transportasi, mengurangi risiko kecelakaan dan kemacetan serta memperluas kesempatan yang sama untuk dapat mengenyam pendidikan (Perdana, 2019; Sabrina & Ishak, 2020) karena zonasi mengharuskan sekolah negeri menerima calon siswa yang berdomisili pada wilayah zonasi. Hal ini menjadi masalah ketika daya tampung sekolah tidak memenuhi. Secara keseluruhan kebijakan pemerataan akses layanan pendidikan melibatkan pelaksanaan pemerintah untuk membuat keputusan apa arti pemerataan, siapa yang penting, bagaimana menyampaikan kebijakan dan siapa yang diuntungkan (Cairney & Kippi, 2021).

Kabupaten Kuningan merupakan wilayah yang berada di Provinsi Jawa Barat yang menerapkan sistem zonasi dalam penerimaan siswa baru pada SMA Negeri. Pelaksanaan zonasi sekolah di Kabupaten Kuningan berpedoman pada Pergub Nomor 29 Tahun 2021 dan Juknis PPDB. Pemerintah Provinsi Jawa Barat sebagaimana Permendikbud Nomor 1 Tahun 2021 pasal 20, menetapkan pembagian wilayah zonasi di Kabupaten Kuningan menjadi empat zona salah satu zonanya yaitu zona D. Penetepan zonasi berlandaskan batas administrasi meliputi beberapa kecamatan di dalamnya. Zona D merupakan wilayah zonasi mencakup kecamatan yang ada di bagian timur Kabupaten Kuningan. Wilayah ini menjadi pintu gerbang masuk Provinsi Jawa Barat yang berbatasan langsung dengan Provinsi Jawa Tengah. Penetapan zonasi di zona D, ditetapkan oleh pemerintah sebanyak 4 SMA Negeri yang masuk ke dalam zona tersebut. Sedangkan ditinjau dari jumlah SMP berdasarkan Dapodik sebanyak 22 SMP tersebar di zona D. Jumlah tersebut belum termasuk jumlah MTs dibawah naungan Kementerian Agama. Hal ini merupakan keterbatasan daya tampung SMA Negeri dalam memberikan pelayanan pendidikan bagi masyarakat. Oleh karena itu, perlu analisis spasial zonasi sekolah di Zona D sebagai optimalisasi daya tampung yang ada untuk menghindari tumpang tindih SMA Negeri dalam menerima siswa baru. Meskipun secara konkuren kebutuhan pembangunan gedung sekolah atau

©2023, Program Studi Geografi Universitas Muhammadiyah Gorontalo

unit SMA menjadi penting sebagai upaya menjamin hak setiap anak wajib belajar 12 tahun (Ayu et al, 2022). Akan tetapi kajian ini akan memberikan pedoman bagi SMA Negeri untuk memprioritaskan siswa mana dan dari mana yang harus diakomodir dalam pemenuhan kuota 50% dari daya tampung sekolah pada jalur zonasi dalam penerimaan siswa baru. Jalur zonasi diperuntukan bagi calon siswa yang bertempat tinggal di dalam wilayah zona yang ditetapkan pemerintah daerah (Permendikbud, 1/2021:17/1).



Gambar 1. Lokasi Penelitian (Sumber: Hasil Analisis, 2023)

Analisis spasial adalah kemampuan yang beragam dan komprehensif mencakup analisis visual peta dan citra. Analisis spasial merupakan bagian dari pemecahan masalah (Cappelli, 2013). Beberapa penelitian analisis spasial dalam mengkaji penerapan zonasi sekolah telah dilakukan. Peneliti Dewi et al., (2020) menganalisa sebaran SD di Kecamatan Banyumanik. Andari et al., (2020) menganalisis daya tampung SD Negeri di Kecamatan Tembalang. Peneliti Ristanti et al., (2021) memetaan sebaran zona layanan SMA Negeri di Kota Bandar Lampung. Penelitian Shodiq et al., (2021) menganalisis perumusan zonasi sekolah pada SMP dan SMA di Kota Banjarmasin. Akan tetapi penerapan zonasi sekolah yang diberlakukan pada setiap wilayah berbeda dan menjadi wewenang Pemerintah Daerah masing-masing. Disisi lain, analisis spasial dalam optimalisasi daya tampung yang ada untuk menghindari tumpang tindih SMA Negeri dalam menerima siswa baru belum pernah diteliti. Atas dasar tersebut, maka pertanyaan penelitian yang diajukan adalah bagaimana sebaran dan area layanan, serta zonasi penerimaan siswa baru SMA Negeri di zona D Kabupaten Kuningan. Berdasarkan pertanyaan penelitian, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sebaran dan area layanan, serta zonasi SMA Negeri di Zona D Kabupaten Kuningan. Metode yang digunakan adalah metode SIG dengan analisis *overlay* dan *thiessen polygon*, serta analisis *supervised classification*. Penelitian ini secara signifikan dapat memberikan manfaat kepada manajemen SMA Negeri untuk mengakomodir penerimaan siswa baru, dan juga sebagai informasi harus ke SMA Negeri tujuan mana untuk mendaftar melalui jalur zonasi.

METODE DAN DATA

Penelitian ini difokuskan di wilayah penetapan zonasi SMA Negeri yang berada pada zona D Kabupaten Kuningan, meliputi 7 kecamatan yaitu Cibingbin, Cibeureum, Cimahi, Cidahu, Ciwaru, Karangkancana, dan Luragung. Serta 2 Kecamatan daerah irisan yaitu

Kecamatan Kalimanggis, dan Kecamatan Waled Kabupaten Cirebon, sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 1. Secara administratif, Kabupaten Kuningan berada di ujung timur Provinsi Jawa Barat berbatasan langsung dengan Provinsi Jawa Tengah. Kabupaten Kuningan terdiri dari 32 Kecamatan dan batas wilayah Kabupaten Kuningan di sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Cirebon, sebelah selatan dengan Kabupaten Ciamis, sebelah barat dengan Kabupaten Majalengka, dan di sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Brebes dan Kabupaten Cilacap Provinsi Jawa Tengah. Zona D dipilih karena wilayah zona ini merupakan wilayah-wilayah yang jauh dari pusat kota di Kabupaten Kuningan dan menjadi pintu gerbang perbatasan Provinsi Jawa Barat dengan Jawa Tengah.

Data yang digunakan pada penelitian ini adalah data primer dan sekunder berupa data geospasial. Data dikumpulkan dari berbagai sumber data. Pengambilan data primer berupa lokasi SMA Negeri dilakukan dengan geotagging memanfaatkan *Google My Maps*. Pengambilan lokasi SMA Negeri dan pembagian wilayah zonasi mengacu pada penetapan zonasi sekolah yang ditetapkan melalui Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 29 Tahun 2021. Data sekunder berupa administrasi diambil dari InaGeoportal. Selain itu Citra Satelit Resolusi Tinggi ter*update* dari *platform Google Earth Pro* dimanfaatkan untuk analisis penggunaan lahan berupa pemukiman penduduk.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode SIG dengan memanfaatkan aplikasi perangkat lunak ArcGIS 10.4. SIG memiliki kemampuan dalam analisis spasial memfasilitasi pemuktahiran, analisis, dan sintesis data spasial serta menghasilkan data terkini dan sangat akurat (Meydan & Öner, 2014). Analisis *overlay* digunakan untuk menganalisis berbagai data spasial dalam membuat pemodelan spasial. Analisis spasial SIG memberikan penelitian yang ideal untuk eksplorasi dan integrasi data geospasial dari berbagai sumber dan format data yang berbeda (Can, 2020). Kemampuan query dan overlay memudahkan pengelolaan data sesuai dengan kebutuhan penelitian. Disisi lain, penginderaan jauh diterapkan untuk menganalisis sebaran penggunaan lahan pemukiman dengan analisis supervised classification. Selain itu analisis *proximity* dengan pendekatan analisis *thiessen polygon* digunakan dalam analisis area layanan SMA Negeri. Analisis *thiessen polygon* biasa digunakan pada keadaan dimana titik tidak tersebar merata dan jarak tidak seragam (Andari dkk, 2020).

HASIL DAN PEMBAHASAN

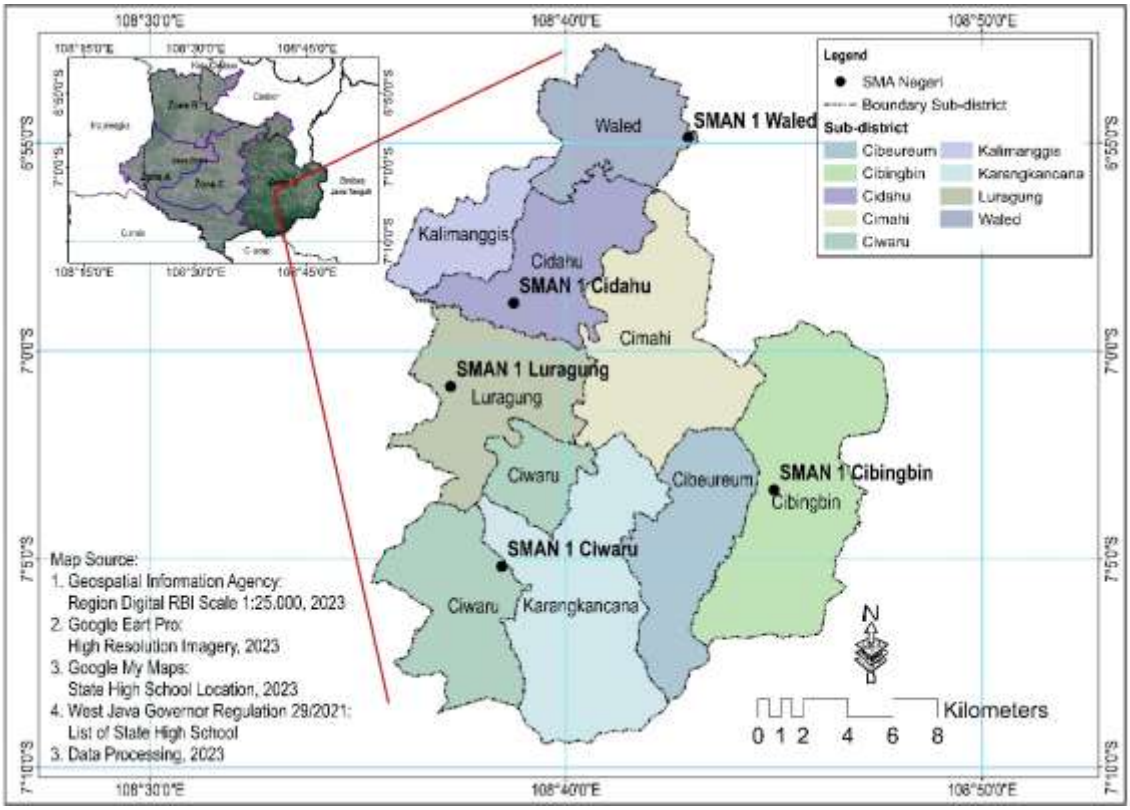
A. Sebaran SMA Negeri

Hasil analisis *overlay* meliputi data batas administrasi dan *geotagging* lokasi SMA Negeri di zona D, diperoleh sebaran SMA Negeri di Zona D Kabupaten Kuningan meliputi daerah irisan berdasarkan Pergub Jawa Barat Nomor 29 Tahun 2021. Hasil analisis dilakukan secara visual dengan menggunakan analisis *overlay* data batas administrasi dan data lokasi SMA Negeri di Zona D Kabupaten Kuningan, seperti ditunjukkan pada Gambar 2. Terdapat empat SMA Negeri yang tersedia di zona D Kabupaten Kuningan yaitu SMAN 1 Cidahu, SMAN 1 Luragung, SMAN 1 Ciwaru, SMAN 1 Cibingbin. Dan satu SMA Negeri berada di Kabupaten Cirebon yaitu SMAN 1 Waled yang merupakan daerah irisan dari Zona D Kabupaten Kuningan. Sedangkan daerah irisan pada wilayah Kecamatan Kalimanggis Kabupaten Kuningan tidak tersedia SMA Negeri.

Wilayah-wilayah kecamatan yang berada dan masuk zona D merupakan wilayah yang berada di bagian timur Kabupaten Kuningan. Meliputi tujuh wilayah kecamatan di antaranya Kecamatan Cibingbin, Cibeureum, Cimahi, Karang Kancana, Cidahu, Luragung dan Ciwaru. Kecamatan Cibingbin dan Kecamatan Ciwaru menjadi pintu gerbang perbatasan Provinsi Jawa Barat dengan Provinsi Jawa Tengah di bagian timur dan selatan. Pada wilayah ini, tersedia dua unit SMA Negeri yaitu SMAN 1 Cibingbin di Kecamatan Cibingbin dan SMAN 1 Ciwaru di Kecamatan Ciwaru. Sedangkan dua kecamatan di antaranya Kecamatan Cibeureum dan Karang Kancana, serta satu kecamatan di utara yang berbatasan dengan Kabupaten Cirebon yaitu Kecamatan Cimahi tidak tersedia SMA Negeri.

Sebaran SMA Negeri di zona D tersebar mengarah ke arah barat menuju ke arah pusat kota Kabupaten Kuningan dan terbatas ke arah timur menuju ke wilayah perbatasan Provinsi Jawa Tengah. Demikian masih terdapat beberapa kecamatan yang tidak tersedia fasilitas pendidikan unit SMA Negeri di antaranya Kecamatan Cibeureum, Cimahi, dan Kecamatan Karang Kancana. Serta satu daerah irisan yaitu Kecamatan Kalimanggis. Empat SMA Negeri

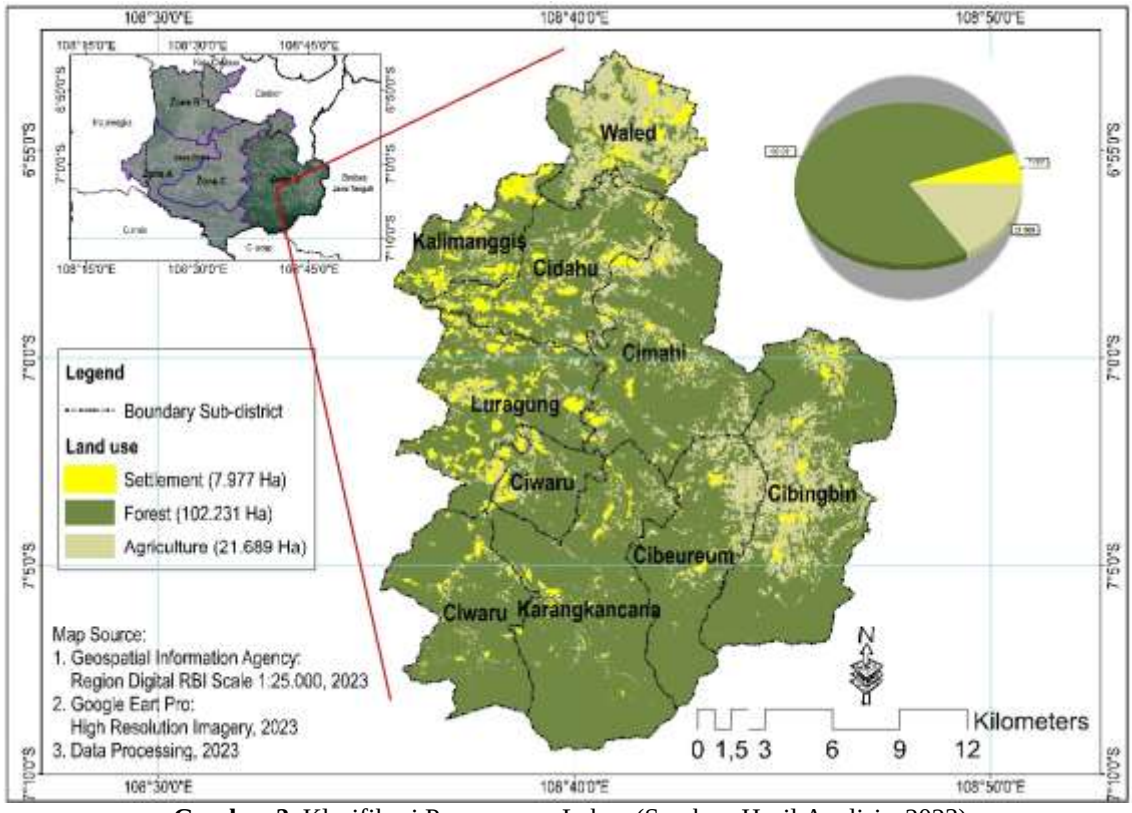
yang tersedia di Zona D Kabupaten Kuningan dalam penerapan zonasi sekolah melalui jalur zonasi dalam penerimaan siswa baru memiliki tugas mengakomodir calon siswa yang berasal dari tujuh kecamatan dan calon siswa yang berasal dari dua kecamatan yang ada di daerah irisan zona D Kabupaten Kuningan. Sedangkan satu SMA Negeri yang berada pada daerah irisan yaitu Kecamatan Waled menjadi prioritas untuk mengakomodir calon siswa dari pembagian zonasi sekolah di Kabupaten Cirebon.



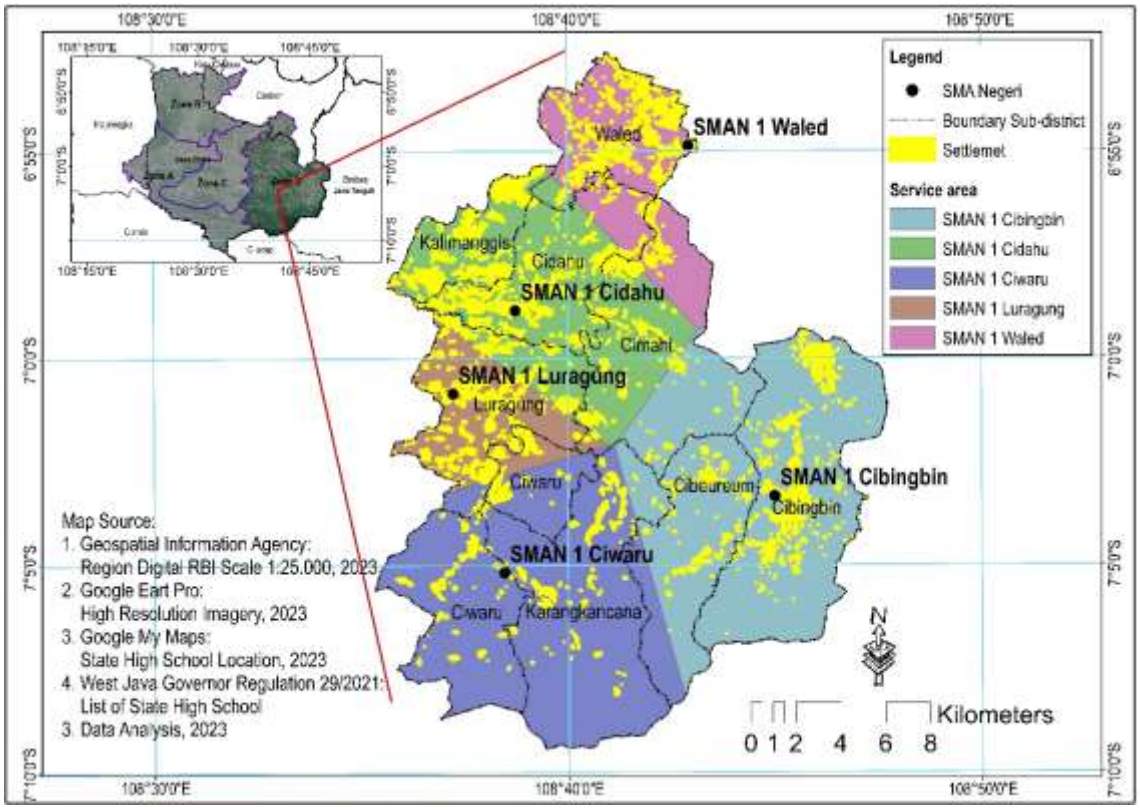
Gambar 2. Sebaran SMA Negeri (Sumber: Hasil Analisis, 2023)

B. Area Layanan SMA Negeri

Analisis area layanan SMA Negeri di Zona D dilakukan untuk pemodelan zonasi penerimaan siswa baru di zona D dari berbagai hasil analisis yang digunakan yaitu analisis penggunaan lahan pemukiman dari Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) dengan pendekatan analisis klasifikasi terbimbing sebagaimana nampak pada Gambar 3. Pada analisis CSRT ini, tiga klasifikasi penggunaan lahan diterapkan yaitu pemukiman, sawah, dan hutan. Hasil analisis memperlihatkan kawasan pemukiman seluas 7.977 ha yang tersebar di zona D, 21.689 ha lahan sawah, dan 10.221 ha merupakan hutan.



Gambar 3. Klasifikasi Penggunaan Lahan (Sumber: Hasil Analisis, 2023)



Gambar 4. Area Layanan SMA Negeri (Sumber: Hasil Analisis, 2023)

Lahan pemukiman tersebut merupakan potensi sebaran tempat tinggal calon siswa di zona D. Selanjutnya analisis *proximity* dengan pendekatan analisis *thiessen polygon* dari data lokasi SMA Negeri dipotong dengan batas zona menghasilkan area layanan SMA Negeri secara merata dari luasan suatu area hasil analisis sebagaimana nampak pada Gambar 4. Data area hasil analisis *thiessen polygon* dan data hasil klasifikasi lahan pemukiman yang diintegrasi dengan

analisis *overlay* memberikan informasi yang signifikan cakupan dan luas setiap wilayah kecamatan, serta luas pemukiman yang terdapat didalamnya, selengkapnya disajikan pada Tabel 1. SMA Negeri 1 Cibingbin memiliki area layanan terluas yaitu seluas 12.534 ha meliputi kecamatan Cibingbin seluas 6.998 ha, Cimahi seluas 1.907 ha, Karangkancana seluas 485 ha, Cibeureum seluas 3.143 ha dan dengan luas pemukiman 351 ha yang tersebar di area layanan SMA Negeri 1 Cibingbin.

Tabel 1. Hasil Klasifikasi Terbimbing, Analisis *Overlay*, dan Analisis *Thiessen Polygon* (Sumber: Hasil Analisis, 2023)

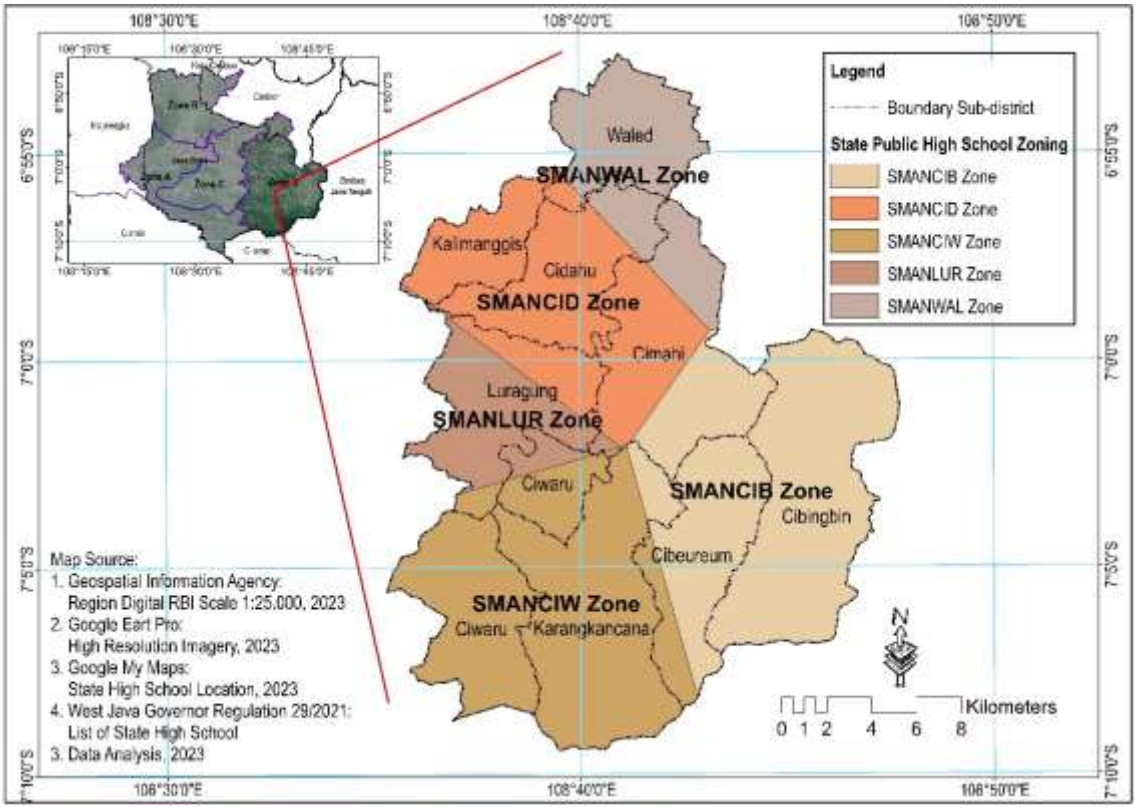
Sekolah	Area Layanan (Kecamatan)	Luas (ha)			
		Kecamatan		Pemukiman	
SMAN 1 Cibingbin	Cibeureum	3.143	12.534	83,04	351,15
	Cibingbin	6.998		253,26	
	Cimahi	1.907		13,8	
	Karang Kancana	485		4	
SMAN 1 Cidahu	Cidahu	2.998	8.735	363,86	1.033.02
	Cimahi	2.510		144,28	
	Kalimanggis	1.940		365,92	
	Karangkancana	2		0	
	Luragung	1.114		154,99	
	Waled	172		4,14	
SMAN 1 Ciwaru	Cibeureum	757	12.025	0,07	269,01
	Cimahi	19		0	
	Ciwaru	4.809		132,84	
	Karangkancan	6.221		128,61	
	Luragung	218		7,49	
SMAN 1 Luragung	Cidahu	9	3.360	0,06	401.42
	Cimahi	78		4,47	
	Ciwaru	422		48,43	
	Kalimanggis	18		1,45	
	Luragung	2.833		346,46	
SMAN 1 Waled	Cidahu	742	4.719	25,06	389,09
	Cimahi	1.086		37,37	
	Kalimanggis	16		0,91	
	Waled	2.875		325,75	

C. Pemodelan Zona Penerimaan Siswa Baru SMA Negeri

Hasil analisis *overlay* dan *thiessen polygon* serta klasifikasi penggunaan lahan pemukiman dengan klasifikasi terbimbing menghasilkan informasi yang signifikan dalam pemodelan zonasi penerimaan siswa baru pada SMA Negeri di Zona D. Berdasarkan hasil analisis dapat ditentunkan zonasi SMA Negeri di Zona D di antaranya Zona SMANCIB, Zona SMANCID, Zona SMANLUR, Zona SMANCIW, dan Zona SMANWAL. Zonasi penerimaan siswa baru SMA Negeri di Kabupaten Kuningan disajikan pada Gambar 5. Zona-zona tersebut merupakan area layanan SMA Negeri di Zona D untuk mengakomodir calon siswa dalam penerimaan siswa baru.

Zonasi SMA Negeri di Zona D Kabupaten Kuningan signifikan untuk pembagian wewenang sehingga tidak tumpang tindih dalam mengakomodir calon siswa dalam penerimaan siswa baru dengan sistem zonasi sekolah. Dalam hal ini, SMA Negeri 1 Waled yang merupakan SMA Negeri yang berada pada daerah irisan diberikan porsi tersendiri area layanan yang mencakup wilayah yang ada di Kabupaten Kuningan. Hal ini memberikan tugas dan porsi yang

sama, sehingga calon siswa dari Kabupaten Kuningan yang bertempat tinggal pada daerah perbatasan Kabupaten Cirebon yang lebih dekat jaraknya dapat mendapat hak yang sama untuk dapat mendaftar melalui jalur zonasi.



Gambar 5. Zonasi Penerimaan Siswa Baru SMA Negeri (Sumber: Hasil Analisis, 2023)

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa SMA Negeri tersebar mengarah ke bagian barat ke arah pusat kota Kabupaten Kuningan dan masih terdapat beberapa wilayah kecamatan yang belum tersedia unit SMA Negeri. Integrasi analisis spasial dengan berbagai metode di antaranya analisis *overlay*, *thiessen polygon* dan *supervised classification* memberikan informasi yang terkait cakupan dan luas setiap wilayah kecamatan, serta luas pemukiman dalam pemodelan area layanan sekolah. Berdasarkan hasil analisis ditentunkan zonasi SMA Negeri di Zona D terdiri dari Zona SMANCIB, Zona SMANCID, Zona SMANLUR, Zona SMANCIW, dan Zona SMANWAL. Disarankan melakukan penelitian lanjutan terkait potensi siswa dapat diterima di SMA Negeri dengan mempertimbangkan jarak tempat tinggal dan umur calon siswa. Hal ini disebabkan karena pada penelitian ini jarak dan umur siswa tidak dianalisis. Sedangkan jarak dan umur siswa menjadi indikator dalam pemenuhan daya tampung SMA Negeri melalui jalur zonasi. Penelitian ini hanya memberikan rekomendasi zona penerimaan siswa baru untuk optimalisasi daya tampung SMA Negeri sehingga lebih efektif berlandaskan pada porsi wewenang yang sama dan berkeadilan dalam menerima calon siswa baru melalui jalur zonasi.

DAFTAR PUSTAKA

A. B. Andari., B. Sasmito., & H. S. Firdaus. (2020). Prediksi Zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru Sekolah Dasar Negeri Tahun 2020-2024 Dengan Menggunakan Sistem Informasi Geografis (Studi Kasus: Kecamatan Tembalang). Jurnal Geodesi Undip, *9*(3), 31-41. https://doi.org/10.14710/jgundip.2020.28107

Ayu, W. D., Arzaqi, N., Kholid, A. L., & Yuwanto. (2020). Evaluasi PPDB Sistem Zonasi Tahun 2021/2022 dalam Pelayanan Publik Sektor Pendidikan oleh Ombudsman RI Jawa Tengah. Spirit Publik, *17*(1), 64-75. 92-103. E-ISSN 2580-3875.

Can, A. (2020) GIS and Spatial Analysis of Housing and Mortgage Markets, Journal of Housing Research, *9*(1), 61-86. https://doi.org/10.1080/10835547.1998.12091927

Cairney, P., & Kippi, S. (2021). The future of education equity policy in a COVID-19 world: a qualitative systematic review of lessons from education policymaking. Open Research Europe, 1-78. https://doi.org/10.12688/openreseurope.13834.2

Cappelli, C. (2013). The Language of spatial Analysis. Esri Press.

Hong, X., Liu, P., Ma, Q., Luo, X. (2015). The way to early childhood education equity - policies to tackle the urban-rural disparities in China. International Journal of Child Care and Education Policy. *9*(5), 1-23. https://doi.org/10.1186/s40723-015-0008-9

Meydan, A., & Öner, S. (2014). Coğrafi Bilgi Sistemleri İle Öğretimin Öğrencilerin Coğrafya Dersine Yönelik Tutumlarına Etkisi. Ankara, Turkey: Turkish Studies - International Periodical for The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic. https://doi.org/10.7827/turkishstudies.7634

Perdana, N. S. (2019). Implementasi PPDB Zonasi Dalam Upaya Pemerataan Akses Dan Mutu Pendidikan. Jurnal Pendidikan Glasser, *3*(1), 78-92. https://doi.org/10.32529/glasser.v3i1.186

Ristanti, Z., Trisnaningsih., & Halengkara, L. (2021). Pemanfaatan Sistem Informasi Geografi (SIG) Untuk Pemetaan Sebaran Dan Zonasi Sekolah Dalam Sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMA Negeri Di Kota Bandar Lampung. Jurnal Penelitian Geografi. *9*(1), 53-63. http://dx.doi.org/10.23960/jpg.v10.i1.22657

Sabrina, D., & Ishak. (2020). Evaluasi Kebijakan Sistem Zonasi dalam Seleksi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tingkat Sekolah Menengah Atas di Kota Pekanbaru. Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan, *18*(2), 92-103. https://doi.org/10.35967/jipn.v18i2.7829

Safitri, M., & Yusran, R. (2021). Evaluasi Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dengan Sistem Zonasi pada SMA Negeri di Kota Padang. Journal of Civic Education, *4*(1), 92-100. https://doi.org/10.24036/jce.v4i1.436

Shodiq, A. M., Sari, D. N. I., & Inayah, N. (2021) Kajian Geospasial Zonasi Sekolah di Kota Banjarmasin. Poros Teknik, *13*(1). 24-34. ISSN 2442-7764.

Soydan, O. (2022). Analysis of Accessibility of Primary Schools in Niğde Using GIS. Turkish Journal of Agriculture-Food Science and Technology, *10*(2), 3022-3028. https://doi.org/10.24925/turjaf.v10isp2.3022-3028.5763

Stewart, G., Devine, N., Benade, L., & Couch, D. (2021). School Zoning: Spatial Justice and Education Policy in Aotearoa New Zealand. New Zealand Journal of Educational Studies, *56*(1), 1–4. https://doi.org/10.1007/s40841-021-00204-5

W. E. K. Dewi., M. Awaluddin., & L. Sabri. (2020). Analisis Spasial Penerimaan Peserta Didik Baru Sekolah Dasar Negeri Berdasarkan Sistem Zonasi (Studi Kasus: Kecamatan Banyumanik). Jurnal Geodesi Undip, *9*(2), 112-121. https://doi.org/10.14710/jgundip.2020.27172

Indonesia. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Pemerintah Indonesia. Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran RI Nomor 4301. Sekretariat Negara. Jakarta.

Indonesia. 2020. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024. Pemerintah Indonesia: Jakarta.

Indonesia. 2021. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Dan Sekolah Menengah Kejuruan. Pemerintah Indonesia: Jakarta.

Provinsi Jawa Barat. 2021. Peraturan Gubernur Nomor 29 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, Dan Sekolah Luar Biasa. Pemerintah Provinsi Jawa Barat: Bandung.

Provinsi Jawa Barat. 2022. Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat tentang Penerimaan Peserta Didik Baru SMA, SMK, dan SLB Tahun 2022. Pemerintah Provinsi Jawa Barat: Bandung.